

DISKUSI
“INDEKS KEBEBASAN EKONOMI”
Jakarta, Freedom Institute, Kamis 12 Oktober 2006
Pembicara:
Ari Perdana
Fadhil Hasan

Moderator:

Selamat malam. Assalamualaikum. Jika minggu lalu kita berbicara tentang politik kelas menengah di Latuharhari 41, maka yang sekarang ini kita akan berbicara tentang *Economic Freedom*. Hal ini jarang dibicarakan, kecuali hal-hal spesifik seperti kenaikan BBM dan dampaknya, dsb.

Diskusi kali ini akan ada 2 narasumber, yang pertama adalah Fadhil Hasan, PhD. Dia ini adalah direktur eksekutif INDEF. Lembaga ini adalah yang mensuplai data ekonomi untuk Fraser Institute. Saya tidak tahu ke mana lembaga-lembaga lain seperti LPEM UI. Bang Fadhil ini akan menjelaskan posisi Indonesia kini menurut Fraser Institute.

Ada juga kerja sama Heritage Foundation dan street Journal yang menerbitkan *Index of Economic Freedom*. Posisi Indonesia disebut sebagai *mostly unfree*. Kalau Fraser Institute, posisi kita ada di 83 dari 130-an negara yang disurvei. Jadi hampir sama.

Pembicara kedua adalah Ari Perdana. Ia adalah seorang peneliti di CSIS. Beliau ini akan membicarakan *economic freedom* di Indonesia 2006.

Saya kira itu sebagai pengantar, silahkan bang Fadhil memulai pembicaraan. Sekitar 15-20 menit.

Fadhil Hasan:

Assalamualaikum. Sebenarnya begini. *Economic freedom* yang dilansir oleh Fraser Insitute itu hanya melihat bidang ekonomi semata. Dan ini berbeda dari *freedom index* yang mengukur *political* dan *civil liberties*. Jadi mungkin saja terjadi suatu negara memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi tapi politiknya tidak bebas. Misalnya adalah Singapura. Ini adalah negara yang kebebasan ekonominya sangat tinggi namun tidak memiliki kebebasan politik. India adalah kebalikan dari Singapura: politiknya bebas, tapi kebebasan ekonomi rendah.

Dalam kebebasan ekonomi ini, unsur-unsur yang biasa digunakan ada 4. Pertama adalah kebebasan pribadi, untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kedua adalah pertukaran sukarela yang dikoordinasi oleh pasar. Jadi pasar adalah dasar dari kebebasan itu. Namun kritik yang sering dikeluarkan dalam hal kebebasan ekonomi adalah bahwa untuk bekerjanya pasar secara efisien, itu ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka alokasi pasar tidak efisien.

Ketiga adalah kebebasan untuk masuk dan berkompetisi di pasar. Keempat adalah perlindungan hak milik pribadi dari agresi orang lain. Hak ini harus dijamin oleh regulasi pemerintah.

Jadi jika didefinisikan, kebebasan ekonomi itu adalah tidak adanya kekangan pemerintah dalam produksi, konsumsi dan distribusi barang-barang demi melindungi kebebasan itu sendiri. Jadi intinya adalah semakin kecil peran pemerintah, itu semakin menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi.

Namun ketika definisi dan unsur-unsur ini diturunkan menjadi indeks kebebasan ekonomi, diperlukan indikator-indikator yang kemudian dipecah lagi menjadi ukuran-ukuran yang bisa diukur.

Pertama adalah besar kecilnya peran pemerintah dalam ekonomi. Kemudian adalah besar kecilnya pajak. Semakin tinggi pajak, maka ini menunjukkan adanya paksaan dari pemerintah. Kedua adalah struktur hukum dan keamanan hak milik pribadi. Ketiga adalah akses ke *sound money*. Kemudian kebebasan untuk berdagang secara internasional. Ini diukur misalnya dari tinggi rendahnya tarif yang diberlakukan secara rata-rata.

Yang terakhir terkait dengan masalah regulasi, masalah kredit, tenaga kerja dan bisnis. Tinggi rendahnya upah minimum dan fleksibilitas tenaga kerja itu yang menjadi ukuran. Semakin fleksibel, semakin bebas. Masing-masing indikator ini kemudian diberi bobot dan dikumulasikan. Ini yang dijadikan alat untuk menyusun kebebasan ekonomi itu.

Fraser institute kemudian membuat cross tabulasi yang menunjukkan hubungan antara kebebasan ekonomi dengan berbagai indikator lain, misalnya kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya kira-kira adalah semakin tinggi kebebasan ekonomi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Kemudian dicari hubungan dengan income per kapita. Semakin tinggi hal ini, semakin tinggi kebebasan ekonomi. Juga hal-hal seperti pengangguran, korupsi, akses terhadap air bersih dan bahkan indeks kebebasan politik di ranah politik juga dihubungkan. Dan yang terakhir ini menyatakan bahwa semakin tinggi kebebasan politik, semakin tinggi juga kebebasan ekonomi. Dan seterusnya. Ada sekitar 16 hubungan yang coba dibuat oleh Fraser Institute.

Tapi secara umum saya mencoba membuat tabulasi itu dengan human development index, juga freedom index, dan juga dengan tingkat korupsi. Ini berdasarkan data dari lembaga yang mengeluarkan indeks-indeks tersebut.

Dan hasil yang saya dapat memang menunjukkan hubungan yang positif antara kebebasan ekonomi dengan indeks-indeks lain itu. Meskipun tahunnya agak berbeda. Ini kan laporan 2006, tapi data yang dipakai tahun 2004. Tapi kan mungkin dalam kurun waktu itu belum terjadi banyak perubahan.

Nah, yang menarik adalah bahwa hubungan-hubungan itu sangat kuat pada negara-negara yang *on the top and on the low ranks*. Jadi negara yang politiknya bebas, ini diikuti oleh kebebasan ekonomi pula. Negara-negara yang memiliki penghasilan per kapita yang tinggi, juga memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi.

Nah, yang banyak mengalami perubahan adalah yang *on the middle*. Misalnya adalah negara-negara skandinavia itu memang dikenal sebagai negara kesejahteraan di mana peran negara itu sangat besar dalam urusan ekonomi. Ini kan menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih rendah dibanding Kanada atau AS. Tapi mereka ini juga

memunyai income per kapita yang tinggi. Jadi di sini ada semacam *outlayers*. Ada kausalitasnya.

Nah, dalam hal kausalitas ini bisa dilihat mana dependent variables-nya mana independent variables-nya. Ini mungkin bisa dites dengan suatu teknik tertentu. Arahnya bisa dilihat. Apakah satu arah, atau timbal balik. Ini yang belum saya coba lakukan.

Secara umum saya bisa menerima argumen bahwa kebebasan ekonomi itu memengaruhi indikator-indikator yang lain. Tapi ada banyak kasus bahwa hal ini dibuktikan lebih jauh lagi dengan menggunakan alat-alat econometrix.

Menyangkut Indonesia, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Pertama adalah bahwa dari sisi sejarah, sejak zaman Belanda Indonesia kan dikenal sebagai negara yang ekonominya terbuka. Ini karena berbagai perkebunan yang ada pada waktu itu—karet, kopi, gula—itu kan sudah terintegrasi dengan ekonomi dunia.

Kemudian, watak kepulauan negara Indonesia itu menyebabkan peranan ekspor menjadi lebih penting. Menyangkut peran pemerintah, ini memang kita bisa berdebat. Fraser ini kan mulai melakukan hal ini pada sekitar 1985. Di waktu ini Indonesia kan sudah banyak melakukan berbagai deregulasi. Dan sejak krisis, banyak juga liberalisasi yang dilakukan terhadap sektor-sektor ekonomi yang selama ini diproteksi. Dari sini saya melihat bahwa seharusnya Indonesia itu semakin bebas.

Kemudian menyangkut peran pemerintah. Dalam hal ini share-nya terhadap GDP dan income per kapita itu sekitar 20%. Ini cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Tapi dalam hal tarif, Indonesia dibanding negara Asia Tenggara yang lain itu Indonesia relatif rendah.

Jadi dalam kasus Indonesia, poin yang ingin saya kemukakan adalah bahwa apakah jika kita menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, maka kebebasan ekonomi ini yang harus diperbesar. Kalau menurut saya bukan. Indonesia sudah cukup liberal.

Dalam pandangan saya, masalahnya bukan besar kecilnya peran pemerintah, tapi apakah pemerintah ini efisien dan efektif atau tidak dalam melakukan regulasi ekonomi. Jadi masalahnya adalah birokrasi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita di Indonesia. Lingkup negara diperkecil, strength-nya diperbesar.

Yang terakhir, kritik terhadap kebebasan ekonomi ini juga banyak dilakukan oleh para ekonom. Yang menarik adalah bahwa ketika indeks Fraser itu dipecah lagi, kemudian dilakukan regresi antara masing-masing indeks tersebut dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, itu hasilnya tidak signifikan. Ada juga yang mengatakan bahwa indeks kebebasan ekonomi ini adalah propaganda dari neolib. Indeks ini kan dibuat oleh Milton Friedman. Dia ini kan *market fundamentalist*.

Kritik terakhir adalah bahwa mereka itu menginginkan pemerintah menarik diri sebisa mungkin dari ekonomi, tapi di sisi lain mereka juga sangat mengharapkan peran pemerintah dalam hal menjamin hak milik pribadi. Jadi seolah ada kontradiksi. Pilihan dalam hal pemerintah dan pasar yang sekarang ini umum bukan *either/or* tapi *both of*.

Demikian untuk pengantar diskusi. Terima kasih.

Ari Perdana:

Tadi Bang Fadhil sudah berbicara tentang proses penyusunan indeks itu sendiri dan beberapa kritik.

Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan secara garis besar. Mengenai konsep kebebasan ekonomi itu sendiri. Kemudian mengenai index economic freedom of the world. Kemudian tentang data 2004 yang digunakan dalam indeks 2006. Lalu terakhir tentang kebebasan ekonomi di Indonesia.

Pertama, apa itu kebebasan ekonomi. Kita bisa mendefinisikan banyak hal. Komponennya adalah pilihan pribadi, pertukaran sukarela, kebebasan untuk masuk dan berkompetisi dalam pasar, dan proteksi terhadap individu dan kepemilikan individu. Dan kalau kita bicara tentang pemerintah, tidak berarti bahwa pemerintah itu diabaikan dalam kebebasan ekonomi. Yang penting adalah bahwa pemerintah menyuplai dan melindungi beberapa hal, dan menahan diri dalam beberapa hal yang tidak perlu ia lakukan.

Kenapa kita memperhatikan kebebasan ekonomi. Friedman menyatakan bahwa kebebasan ekonomi adalah bagian dari total freedom. Dan ia juga mengatakan bahwa kebebasan ekonomi adalah salah satu cara mencapai kebebasan politik. Amartya Sen juga mengatakan hal yang serupa.

Dalam laporan yang ditulis Fraser ada satu Bab yang ditulis oleh William Easterly. Dia ini adalah musuh no 1-nya Jeffrey Sach. Beberapa klaim yang dikemukakannya adalah bahwa kebebasan ekonomi itu bisa mendorong kemajuan ekonomi. Di negara yang ekonominya bebas, akan terjadi kompetisi yang akan menjadi invisible foot yang akan menendang orang-orang yang tidak kompetitif.

Kebebasan ekonomi itu juga memberikan feedback tentang apa yang potensial berhasil dan apa yang potensial gagal. Ini menurut Easterly tidak akan terjadi dalam economic planning.

Kemudian kebebasan ekonomi juga memungkinkan para pelaku ekonomi mengambil berbagai keputusan dalam ketidakpastian. Dan dia bisa menilai jika terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan.

Dalam beberapa paper yang dikutip juga dikatakan bahwa kebebasan ekonomi itu juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paper yang lain juga mengatakan bahwa kebebasan ekonomi itu memengaruhi *social trust*.

Kedua, ada konsep yang namanya kebebasan ekonomi, dan kita tahu bagaimana konsep itu bisa dikuantifikasi. Dan juga bagaimana dengan kuantifikasi itu kita bisa melakukan perbandingan antarnegara. Inilah motivasi economic freedom index ini. Dia mengambil skor 0 – 10 untuk tiap negara. Total skornya didasarkan pada 5 wilayah utama. Dan ini dipecah lagi menjadi 21 komponen dan subkomponen.

Jadi indeks ini adalah gabungan dari beberapa indikator, dan indikator ini adalah data sekunder. Misalnya data GDP, data alokasi subsidi pemerintah, data tentang competitiveness dan risiko usaha, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kompilasi data dari pihak lain. Dan beberapa data yang sifatnya obyektif dan ada yang subyektif.

Sebagai sebuah indeks, ia tentu mempunyai beberapa kelemahan yang bisa kita kritik. Pertama, data ini mencakup periode waktu yang sepanjang mungkin dan cakupan negara yang seluas mungkin. Konsekuensinya ada beberapa variable/data yang tidak tercakup. Kedua, sebagaimana dengan indeks-indeks lain, ada juga pertanyaan tentang seberapa sempurna dia menggambarkan konsep yang coba ia deskripsikan. Ada juga yang mengatakan bahwa terlalu banyak indikator yang dimasukkan, ada yang mengatakan terlalu sedikit. Jadi ada *trade-off* antara *more aggregate* atau *less aggregate*.

Kelemahan ketiga, ia didasarkan pada indikator yang berbeda-beda, yang penyusunannya berbeda, dan konteksnya juga berbeda. Kemudian juga problem *robustness*, artinya kalau satu indikator kita hilangkan, apakah data itu konsisten tidak dalam perangkingsnya. Saya sendiri belum melakukan ini secara pribadi. Tapi menurut pembuatnya ini tidak ada masalah.

Keuntungan dari indeks ini adalah bahwa kita punya ukuran kuantitatif. Kita bisa menggunakannya bukan sebagai end product. Ini sama seperti indeks apa pun.

Ketiga, secara umum, beberapa temuan terakhir dari Fraser menunjukkan bahwa Hong Kong dan Singapura masih tertinggi, kemudian ada Selandia Baru, AS, Irlandia, Kanada. Yang menarik adalah India dan Cina. Cina ini skornya turun dari 2003 skornya 6,0 dan di tahun 2004 skornya menjadi 5,7. Sementara India naik. Klaim dari Fraser adalah bahwa perubahan ekonomi di India lebih mendalam.

Ini tidak ada korelasinya dengan kebebasan sipil dan politik. Hong Kong dan Singapura itu secara politik tidak bebas, tapi secara ekonomi peringkat satu. Tapi di papan bawah ada korelasi antara kebebasan ekonomi dan kebebasan politik. Venezuela itu termasuk di 4 terbawah. Ini sebenarnya korelasi yang sederhana.

Beberapa indikator yang lain adalah bahwa kebebasan ekonomi itu biasanya berasosiasi dengan kondisi sosial yang lebih baik. Negara yang bebas itu biasanya mempunyai HDI yang tinggi, tingkat harapan hidup yang tinggi, kematian bayi yang rendah.

Tadi Bang Fadhil mengatakan bahwa beberapa indikator tidak terlalu konsisten jika negara itu ada di tengah-tengah, tapi cukup konsisten jika ada di ujung atas dan ujung bawah. Persentasi buruh anak-anak juga sangat rendah di negara yang ekonominya bebas. Korupsi juga demikian. Tentu dengan beberapa catatan bahwa korelasi sederhana ini tidak perlu terlalu diambil hati.

Meski di sini kita tidak bisa serta merta mengklaim bahwa kebebasan ekonomi pasti akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi paling tidak ada kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa kebebasan ekonomi itu membawa pada hal yang lebih jelek. Ini nanti kita bahas lagi.

Terakhir adalah bagaimana dengan kondisi Indonesia. Secara umum skor kita turun tidak terlalu jauh. Dari 2003 ke 2004 ada 3 negara baru yang masuk. Dengan adanya itu, Indonesia turunnya 5 poin. Dari 5 komponen, hanya komponen kebebasan untuk berdagang secara internasional yang turun skornya di Indonesia. Dalam ukuran pemerintah dan perlindungan hak milik pribadi Indonesia juga turun.

Yang problematik adalah di komponen mengenai regulasi. Di beberapa komponen terjadi perbaikan dibanding tahun 2003. Waktu untuk mendirikan bisnis juga memburuk. Makin banyak *irregular payment*. Jadi korupsi yang makin tidak teratur.

Kembali ke diskusi tentang *economic freedom index* ini, kalau kita bicara tentang mekanisme sosial yang memberi ruang untuk pilihan individu, kita perlu mekanisme sosial untuk memperbaiki terutama *voluntary exchanges*. Karena exchange ini, adanya *take and give* ini bisa memberi keteraturan tanpa perlu ada coercion.

Menurut Friedman, sistem organisasi sosial yang memungkinkan hal ini adalah kapitalisme kompetitif. Meskipun Friedman juga mengakui bahwa kalau kita bicara exchanges dalam free market, tidak kemudian kita menghilangkan the need for government, tapi bagaimana pemerintah itu bisa menjamin kebebasan.

Kalau kita percaya dengan indeks ini, Indonesia masih belum bisa dibilang sebagai negara yang secara ekonomi bebas. Dia tidak lebih bebas dari banyak negara. Bahkan dibanding Mesir, ia secara ekonomi lebih tidak bebas. Dibanding di pertengahan 1990-an, kondisi Indonesia juga lebih tidak bebas.

Kalau indeks kebebasan ini adalah petunjuk tentang kondisi kapitalisme di sebuah negara, maka kita belum bisa bilang bahwa Indonesia adalah negara kapitalis dengan ekonomi liberal. Meskipun kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa kebebasan ekonomi itu memunculkan kehidupan yang lebih baik, namun kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa kondisi sosial yang belakangan ini memburuk adalah akibat dari kapitalisme. Ini karena kapitalisme di Indonesia belum berjalan secara murni dan konsekuen.

Moderator:

Ok, Mas Ari Perdana lebih berani menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi bisa memunculkan kondisi-kondisi ekonomi yang lebih baik. Kalau Mas Fadhil bilang butuh penelitian lebih dulu.

Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, saya kira kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan, kemudian dijawab.

Penanya I:

Dari paparan kedua pembicara tadi, terkesan bahwa negara tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang berbau bisnis. Sementara hal-hal yang bersifat bisnis serahkanlah ke pihak swasta.

Namun di sisi lain negara diminta mengurus kepentingan publik. Apa kesalahannya di sini. Kenapa negara tidak mengomersialkan hal-hal yang juga dikomersialkan oleh pihak swasta.

Kedua, bagaimana menjelaskan Hong Kong dan Singapura, juga negara-negara lain yang secara ekonomi maju, tapi secara politik belum demokratis. Atau bahkan sebaliknya. Jadi apa yang menjadi faktor dari masing-masing fenomena itu. Tadi kan ada freedom, pertumbuhan, dan kemudian faktor yang ketiga adalah kesejahteraan. Saya melihat tadi yang dikaji hanya masalah pertumbuhan. Bagaimana mengaitkan antara freedom ini dengan kesejahteraan. Sementara tidak selamanya kebebasan dan pertumbuhan itu berkaitan langsung dengan kesejahteraan.

Demikian terima kasih.

Moderator:

Silahkan penanya berikutnya. Yang di bagian belakang. Mohon menyebutkan nama dan singkat saja pertanyaannya.

Penanya II:

Assalamualaikum. Nama saya Fuad dari KAHMI.

Pertama saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Bapak Ari mengenai sosialitas dan kebebasan ekonomi. Jadi ada korelasi di dalamnya. Dan sosialitas itu ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat independensi masyarakat.

Sebaliknya juga begitu. Masyarakat akan memiliki kebebasan untuk beraktivitas ekonomi jika mereka memunyai kepercayaan yang besar kepada komunitas di mana dia tinggal. Itu saya sangat sepakat.

Jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan adanya korelasi antara kebebasan ekonomi dan kemajuan ekonomi dalam suatu negara.

Kedua, apakah dalam pengambilan kesimpulan ini ada hubungan antara independen variable yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini saya merujuk pada kesimpulan Pak Fadhil mengenai korelasi antara kebebasan ekonomi dan kemajuan ekonomi.

Artinya apakah betul dari sampel negara yang sudah dikumpulkan ini, dari peringkat 1 hingga terakhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tiap negara ada korelasi positif dalam hal ini. Ini karena peringkat 1 – 10 adalah negara-negara terbaik. Selain itu, saya melihat adanya ketidak proporsionalan antara kebebasan ekonomi dengan kemajuan ekonomi.

Di samping itu saya juga khawatir dalam hal politik. Seperti Singapura kan antek suatu negara dan demikian juga Hong Kong. Di bawah kita bisa melihat Zimbabwe secara politik bagaimana keadaannya.

Satu lagi yang terakhir, tentang pembatasan antara swasta dan negara. Saya sangat marah jika negara ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya ditangani oleh pihak swasta. Ini karena saya menganut neolib atau apa pun, tapi lebih karena saya sepakat dengan Mas Ari bahwa akan terjadi ketidakefisienan.

Demikian, terima kasih. Wassalam.

Moderator:

Terima kasih. Anda ini bisa dimarahi sama Pak Saiful karena berpikir konspiratif. Silahkan penanya selanjutnya.

Penanya III:

Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Feri dari Jakarta.

Tadi kan kita melihat bahwa tidak ada korelasi kebebasan ekonomi dan kebebasan politik. Saya hanya ingin mengetahui nilai kebebasan ekonomi itu dinilai berdasarkan apa? Karena kalau kita lihat sistem kebebasan yang dipakai mungkin mengacu pada aspek-aspek ekonomi suatu negara.

Apakah kebebasan ekonomi dan kebebasan untuk menganut suatu sistem ekonomi bisa disatukan sehingga bisa mewujudkan menjadi suatu sistem. Ini pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan kedua, tadi kan disebut kebebasan ekonomi dipengaruhi oleh aspek ini dan aspek itu. Apakah hal ini memengaruhi tingkat pendapatan suatu negara sehingga negara itu bisa menganut kebebasan ekonomi yang bisa menjangkau masyarakat luas pada umumnya.

Itu dari saya, terima kasih.

Moderator:

Terima kasih. Bang Ichsan, silahkan.

Penanya IV:

Nama saya Ichsan. Soal negeri ini. Negeri ini sebenarnya kasihan. Di kalangan kiri, negeri ini dianggap kapitalistik. Tapi kalangan liberal mengatakan bahwa negeri ini belum kapitalis. Jadi terhimpit.

Tapi saya ingin melihat ke lapangan. Ada satu masalah dengan industri eceran. Misalnya keberadaan *hypermarket*. Di Jakarta, *hypermarket* ini kan ada di tengah-tengah kota dan di mana-mana. Padahal di negara paling maju ia ada di pinggiran.

Kedua, setiap pemasok yang ingin memasukkan barangnya itu dikenakan biaya yang cukup besar. Sekitar 40 – 50 juta per item. Jadi pertanyaannya kalau *hypermarket* itu bisa ada di tengah-tengah kota, apakah ini bukan karena kebebasan. Atau justru para pembuat regulasi kita yang tidak paham sehingga ada hal yang harus diurus tidak diurus, ada hal yang tidak perlu diurus malah diurus.

Jadi pertanyaan saya begini. Ini kan bisa dianggap bahwa negeri ini sebenarnya bebas. Tapi tidak terkelola.

Kemudian, kasus Cina. Nilainya tadi turun. Padahal setahu saya kan semakin bergerak ke bebas.

Ketiga, apakah kita bisa membuat suatu kategori dari 20 besar itu negara yang secara politik tidak begitu bebas.

Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

Moderator:

Ok. Penanya selanjutnya. Silahkan Mas Saiful.

Penanya V:

Nama saya Saiful. Saya meneruskan Ichsan tadi. Lagi-lagi kasus Singapura. Saya punya beberapa jawaban hipotetis untuk kasus Singapura.

Salah satu penjelasan, dan ini harus dikonfirmasi dengan data, adalah bahwa ada yang disebut sebagai *rent seeking state*. Apakah Singapura masuk ke dalam kategori itu. Salah satu definisi dari konsep itu adalah bahwa pendapatan negara tidak berasal dari

masyarakat. Terutama pajak. Tapi pendapatannya dari luar. Karena Singapura adalah negara pelabuhan, maka pemerintahnya mendapatkan uang dari transit-transit. Ini namanya negara rente.

Ada model negara rente yang lain, yakni negara-negara Timur Tengah. Kalau tadi singapura dari negara asing masukannya, negara-negara Timur Tengah masukannya dari Allah SWT.

Hubungannya dengan kebebasan adalah bahwa kenapa kebebasan ekonomi di Singapura tidak menghasilkan kebebasan politik. Penjelasan adalah seperti di atas. Ini hipotetis.

Di kita, terjadi liberalisasi kan karena itu. Minyak dari Allah habis, maka dibuat liberalisasi. Ini kan artinya pajak, dan kalau pemerintah menarik pajak, maka harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat. Maka terjadilah kebebasan.

Di Singapura, karena pemerintah Singapura mensubsidi semua hal, maka rakyat tidak bisa menuntut. Rakyat dibayari oleh pemerintah. Jadi rakyatnya sangat bergantung pada negara. Negara seperti bapak. Pola patron-klien terjadi di situ. Demikian juga di negara-negara Timur Tengah.

Jadi ini mungkin penjelasannya. Konteksnya adalah negara rente, dan ini hipotetis. Tugas Ari untuk membuktikannya.

Demikian, terima kasih.

Moderator:

Ya, saya kira langsung saja dijawab.

Fadhil Hasan:

Yang terakhir dulu dari Mas Saiful. Memang Singapura itu ditinjau dari berbagai aspek tidak bisa dianggap sebagai representasi bagi negara-negara pada umumnya. Ini karena ukurannya kecil dan seterusnya.

Tapi kalau kita lihat negara-negara Asia Timur itu memang tampak ada kemiripan, terutama di tahun 1990-an. *The Miracle of East Asia*. Ini menunjukkan bahwa ada cara lain bagaimana ekonomi itu tumbuh dengan tidak meniru cara Amerika dan Eropa Barat.

Nah, titik ekstrem mungkin Singapura. Tapi kalau lihat negara-negara seperti Thailand, Jepang, itu kan sampai tingkat tertentu ada kemiripannya dengan Indonesia. Memang di tahun 1980-90an kan kita punya rejeki minyak. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sistem politik. Ini yang pertama.

Kemudian tentang kebebasan dan kemajuan, seperti disebut Ari tadi, memang kalau lihat data itu hubungannya positif. Tapi memang saya belum melihat kausalitasnya. Apakah ini disebabkan oleh kebebasan atau justru dua arah.

Menurut saya, logikanya juga bisa ditemukan bahwa kebebasan itu mendorong kesejahteraan. Karena orang bebas kan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan dia. Jadi kebebasan bisa memaksimalkan potensi orang atau masyarakat. Jadi secara konseptual memang ada hubungan seperti itu.

Tentang di mana atau dalam hal apa negara harus bertanggung jawab, itu mungkin dalam hal-hal pendidikan, pangan dan tempat tinggal. Jadi menyangkut hal-hal yang bersifat basic needs. Di hal-hal lain, itu bisa dikuasai negara bisa juga tidak.

Tentang pertanyaan Ichsan, kita sosialis tidak kapitalis tidak, itu saya kira memang betul. Kalau kita baca buku Fukuyama, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal di mana negara tidak boleh ikut campur tapi negara malah masuk, sementara hal-hal yang seharusnya diatur oleh negara malah diabaikan.

Tentang hypermarket, itu sebenarnya kan soal aturan. Urusan seperti ini oleh pemerintah pusat dikasih ke Pemda. Mungkin yang masalah adalah Pemda sendiri. Mungkin dia tidak memahami masalah ini sehingga timbul pembangunan hypermarket di tengah kota. Dan pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

Moderator:

Silahkan dilanjutkan Mas Ari.

Ari Perdana:

Tadi Saiful sudah membantu menjelaskan soal Singapura. Ini memang sulit. Saya sendiri tidak pernah memunyai suatu jawaban yang memuaskan.

Selain yang dikatakan Saiful tadi, juga ada teori *the size of the country*. Singapura dan Hong Kong dari segi *size* itu masih mungkin untuk mengatur ekonominya. Ini satu hipotesis. Ada juga teori *benevolent dictators*. Kalau diktatornya punya tujuan yang bagus, itu kebebasan politik tidak selalu bertentangan dengan kebebasan ekonomi.

Tapi kalau kita teliti literatur tentang hubungan politik dan kebebasan ekonomi, kita tidak pernah memunyai jawaban yang pasti. Studi-studi kuantitatif yang baru tidak menemukan hubungan yang pasti antara kebebasan politik, *civil liberties*, dan kesejahteraan ekonomi. Memang di wilayah ini ada misteri yang besar.

Ada juga teori dari Adam Przeworski yang mengatakan bahwa ada batas atau threshold tertentu yang menjadikan suatu pemerintahan itu *sustainable*. Jadi kalau dia demokratis, maka ia akan demokratis seterusnya; dan kalau otoriter, dia akan otoriter seterusnya. Ini ramalah Adam Przeworski. Saya lupa angkanya yang tepat, tapi ini bisa diberlakukan bagi Singapura. Dia meramalkan bahwa Singapura akan seterusnya otoriter karena sudah melewati batas itu. Ini teori *sustainability of democracy*. Jadi teori-teori tentang hubungan kesejahteraan ekonomi dan politik memang tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan.

Pada akhirnya kebebasan ekonomi dan kebebasan politik memang dua wilayah yang berbeda. Dan kita memperjuangkan demokrasi bukan semata-mata demi tujuan ekonomi semata. Dan sebaliknya.

Kemudian tentang sektor-sektor apa saja yang tidak bisa dimasuki oleh negara. Kalau saya lebih suka mendefinisikannya sebagai kegiatan apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara.

Dalam teori Friedman, ada beberapa hal yang memang merupakan public goods. Misalnya, pertahanan, otoritas moneter. Negara juga bisa masuk ketika barang atau komoditas itu tidak bisa disediakan oleh pasar. Misalnya pendidikan, kesehatan. Tapi ini pun sebenarnya batasnya kabur.

Kalau kita bicara sektor, ada beberapa sektor yang pada awalnya perlu negara. Tapi dasar ekonominya adalah bahwa jika ada agen yang tidak bisa memberikan keuntungan, maka agen itu kita pecat. Dalam kasus negara, BUMN itu kan tidak jelas bertanggung jawab ke siapa. Bertanggung jawab ke rakyat, tapi rakyat itu siapa. Ini yang menjelaskan mengapa BUMN banyak yang korup dan tidak efisien.

Balik ke teorinya Easterly, *planner* itu mungkin tidak gagal. Tapi planner itu mungkin tidak tahu mana yang sukses dan mana yang tidak sukses. Uni Soviet itu gagal karena semuanya dibebankan kepada *planning*. Sedangkan pasar punya mekanisme untuk mengidentifikasi *winner*s. Ini salah satu argumen tentang di mana sebenarnya posisi negara.

Tentang industri eceran, saya tidak begitu mengerti. Jadi saya masih ambigu juga. Sebagai konsumen, saya jelas diuntungkan ada hypermarket di tengah-tengah kota. Meskipun ini sebenarnya tidak fair. Kalau di luar negeri, memang itu biasanya ada di pinggiran. Saya tidak begitu tahu itu ada di pinggiran karena regulasi atau karena memang mereka optimal jika ada di pinggiran.

Tentang korelasi kebebasan ekonomi, kesejahteraan dan kebebasan politik, tadi sudah saya singgung. Intinya korelasinya tidak mengatakan apa-apa. Negara-negara yang memiliki kebebasan ekonomi memang negara-negara yang kaya secara sejarah.

Kemudian ada hipotesis Easterly, negara-negara berkembang, yang memiliki sektor perkembangan manufaktur yang tinggi, itu biasanya pertumbuhannya akan lebih cepat. Di sini Easterly menunjukkan adanya kausalitas dan bukan hanya korelasi. Ada kausalitas antara kebebasan ekonomi dan sektor manufaktur. Alasannya adalah karena kalau kita punya kebebasan ekonomi, pasar itu bisa menentukan mana yang potensial *winner*, mana yang potensial *loser*. Dan ini jauh lebih baik daripada *central planning*. Jadi ada kausalitas.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

Moderator:

Ok. Jika masih ada pertanyaan. Silahkan.

Penanya VI:

Nama saya Hamid. Di the Economist minggu lalu, itu ada survei yang bagus sekali. Intinya adalah bahwa pertumbuhan negara-negara maju itu sangat kecil. Rata-rata 1,3%. Negara-negara berkembang, termasuk kita, cukup tinggi yakni 3, sekian persen. Ini berkat globalisasi.

Jadi apa yang terjadi? Negara-negara berkembang secara umum memang tumbuh. Dan ini berkat globalisasi. Jadi tidak benar jika globalisasi itu skemanya adalah *win-lose*. Bahkan kecenderungannya yang *win* adalah negara berkembang.

Nah, saya ingin bertanya apa hubungan hal itu dengan kebebasan ekonomi. Apakah ini berarti derajat kebebasan ekonomi negara berkembang itu lebih tinggi. Ini tentu saja sangat hipotetis.

Kedua, hari ini kita baca ada komplain tentang direktur baru TVRI. Direktur ini bekas ketua DPP Golkar. Kecurigaannya adalah bahwa ini adalah orangnya Jusuf Kalla. Sebagai direktur program, orang dari Blora Center. Namanya Rully. Dan ini orangnya SBY. Yang menjadi masalah adalah bahwa TVRI itu karena milik negara, maka dia akan terus menerus menjadi ajang pertarungan kekuasaan. Ini juga sangat jelas terjadi pada BUMN.

Poin saya adalah bahwa hal itulah yang akan terjadi kalau negara ikut dagang. Kalau kita kaitkan, yang menarik adalah pasal 33 UUD. Dalam konteks apa pasal itu dicantumkan. Apa dasar pemikiran yang mendasarinya. Jika sudah tidak relevan dengan semangat zaman, apakah tidak sebaiknya pasal itu dihapus. Sebab yang disebut milik negara itu sebenarnya apa.

Demikian komentar dan pertanyaan saya. Terima kasih.

Moderator:

Terima kasih. Silahkan Mas Rudi.

Penanya VII:

Assalmualaikum. Nama saya Rudi.

Sebenarnya saya sulit menangkap apa sebenarnya inti indeks kebebasan ekonomi ini. Karena kedua pembicara dan audiens sepertinya sepakat bahwa ini tidak menjelaskan apa-apa tentang hubungan kebebasan ekonomi dan pertumbuhan. Tapi kalau saya lihat, parameter yang digunakan itu parameter yang menuju ke sistem liberal.

Tapi kalau ini dikatakan sebagai indeks liberalisme suatu negara, kasihan sekali orang-orang yang mendukung liberalisme. Karena ternyata di negara-negara yang tidak kita inginkan, itu juga memunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Kemudian, yang paling penting dari faktor ekonomi ini saya lihat adalah soal pertumbuhan dan pemerataan. Apakah kebebasan ekonomi itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Kedua, apakah kebebasan ekonomi itu juga menunjukkan adanya pemerataan. Tadi Bang Husein sudah menyinggung, tapi tidak terjawab sebenarnya. Apakah memang ada kesejahteraan.

Saya kira itu saja. Terima kasih.

Moderator:

Ok. Selanjutnya, silahkan.

Penanya VIII:

Saya lihat memang survei ini tidak menjelaskan apa-apa. Saya sepakat itu tadi. Kalau kita perhatikan negara-negara yang maju secara ekonomi, itu kalau kita cari benang merahnya adalah karena faktor manajemen. Contohnya adalah Jepang. Demikian juga Singapura.

Kita juga pernah sangat diktator, tapi manajemen kita kacau balau. Kalau Singapura, negara kuat, tapi juga *manageable*. Mereka dengan mudah mengubah fokus dari industri ke jasa. Singapura itu sekarang punya apa yang disebut sebagai *quality policy*. Dan Indonesia sebaliknya.

Jadi benar kata Bang Fadhil bahwa banyak uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tapi malah digerogeti. Ini karena manajemennya tidak bagus.

Saya juga setuju dengan teori ukuran negara. Kennichi Ohmae juga kan sebenarnya mengarah ke sana dengan memunculkan ide tentang negara wilayah. *Region state*. Kita harus mendorong itu. Aceh bisa dijadikan percobaan. Jadi kita harus mendorong desentralisasi, federalisme.

Kemudian tentang persoalan mana yang bisa dikerjakan negara mana yang tidak, ada persoalan. Seharusnya kita melakukan turn around, sama seperti perusahaan melakukan hal ini. Mana yang efektif kita teruskan, mana yang tidak kita hentikan. Sehingga hal ini bisa berjalan dengan baik.

Ketiga, yang perlu kita lakukan untuk manajemen negara adalah *down sizing* birokrasi. Karena birokrasi yang besar itu berkolaborasi dengan politisi untuk menciptakan beban. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan DKP. Menurut saya ini cukup diurus oleh kementerian negara. Jadi mereka cukup membuat standar dan daerah yang melaksanakannya.

Yang terakhir, apa yang baru saya katakan adalah sebuah sistem yang harus disepakati melalui mekanisme demokrasi. Ini untuk menghindari kolaborasi antara politik dan birokrasi.

Demikian, terima kasih.

Moderator:

Ok. Terima kasih. Langsung dijawab saja.

Fadhil Hasan:

Kalau pertumbuhan negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang itu kan pasti begitu. Mereka sudah lama tumbuh, jadi ada limitnya. Negara-negara Amerika itu kalau tumbuh 3 – 4% itu sudah luar biasa. Jepang juga begitu.

Tentang BUMN, saya tidak anti terhadap keberadaan BUMN. Selama BUMN itu hidup dalam persaingan dengan swasta dan dia bisa eksis, itu kenapa harus diprivatisasi. Jadi yang penting ada kinerja yang bersaing. Persoalannya kan kalau ada monopoli. Misalnya Garuda. Ini kalau bisa eksis kan gak apa-apa.

Jadi intinya adalah bahwa untuk meningkatkan efisiensi perlu dikenalkan iklim kompetisi. Jadi bisa dipisahkan antara fungsi regulasi yang dijalankan oleh departemen, dan fungsi pemain di BUMN itu sendiri. Karena tidak semua perusahaan negara itu tidak efisien. PGN, misalnya, itu efisien. Dengan demikian, kita tidak bisa menggeneralisir bahwa yang dikuasai negara itu tidak efisien.

Privatisasi juga ada berbagai skema. Jangan yang terjadi adalah rampokisasi. Karena jika ada monopoli oleh swasta, hal inilah yang terjadi. Jadi ada banyak skema dalam meningkatkan efisiensi perusahaan negara. Dan salah satunya mungkin adalah privatisasi.

Kemudian, kalau kita semata-mata melihat indeks kebebasan ekonomi saja, itu memang kurang bermakna. Memang ini harus dikaitkan dengan berbagai indikator lain seperti pemerataan, pertumbuhan, dst. Dalam hal ini saya sepakat bahwa tidak ada hubungan yang kuat bahwa kebebasan ekonomi itu mendorong pertumbuhan. Ini suatu hal yang sangat kompleks dalam ekonomi.

Saya kira itu saja. Saya mohon maaf karena harus pergi duluan.

Moderator:

Terima kasih Bang Fadhil. Jadi posisi Bang Fadhil di mana ini. Tengah ke kanan apa tengah ke kiri. Sekarang kita ke Mas Ari.

Ari Perdana:

Dosen saya, Faisal Basri, pernah bilang bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa karena bertentangan dengan pasal 33. Jangan-jangan yang salah pasalnya itu. Itu jauh sebelum dia menjadi calon gubernur DKI. Saya tidak tahu apakah dia sekarang ini sudah merevisi posisinya atau belum.

Soal indeks ini. Pada akhirnya semua indeks apa pun tidak serta-merta mengatakan tentang semua hal. Kita melihatnya hanya sebagai angka. Ini bukan berarti tidak berguna. Kita bisa melihatnya sebagai indikasi hal-hal lain. Sama seperti indeks kebebasan ekonomi ini. Memang ketika kita membuat agregasi tiap-tiap negara, setiap indikator apa pun itu selalu punya masalah. Indeks ini hanya indikator bagaimana sebuah perekonomian sebuah negara itu bisa *friendly* terhadap individu.

Sebuah papar tahun 1983 dari Gary Becker menyatakan bahwa kalau terjadi kompetisi politik yang benar-benar kompetisi, pada akhirnya mereka saling meniadakan. Contohnya adalah tahun 2002 ada ide dari pemerintah untuk membebaskan kewajiban dari penunggak BLBI besar. Ini akhirnya dibatalkan. Bukan karena demo di jalan, tapi karena sesama penunggak yang sudah bayar itu protes. Dan anggota DPR yang menjadi patronnya itu juga protes.

Ini indikasi bahwa jika memang ada kompetisi yang sehat, yang benar-benar kompetisi, maka rent seeking itu akan terminimalisasi, dan kebijakan yang paling dipilih adalah kebijakan yang menyuarakan *median voters*.

Satu kelemahan yang saya temukan di indeks ini adalah bahwa desentralisasi tidak masuk di sini. Bahkan kalau desentralisasi itu diartikan sebagai transfer dari pemerintah ke daerah, itu malah menjadikan dia semakin buruk. Jadi saya sebenarnya ingin mengusulkan bahwa pengambilan keputusan yang terdesentralisasi itu bisa masuk ke dalam indikator.

Moderator:

Saya kira cukup sampai di sini. Dua jam setengah kita berdiskusi. Terima kasih pada Mas Ari Perdana dan bapak ibu sekalian.

Sampai jumpa di tempat lain. Wassalamualaikum.